



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JULIYATMONO
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 37933

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 9.074.800.000**

1. Tanah Seluas 1.823 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/600 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 3.480.000.000
4. Tanah Seluas 8.500 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 2.737 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.094.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 70.900.000**

1. MOBIL, NISSAN TERRANO JEEP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, WARISAN Rp. 2.700.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 3.200.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
5. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	183.359.050
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	599.124.246
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.928.183.296
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.928.183.296

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.